



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 26 November 2018

Halaman: 13

Perlu Segera Dilakukan Normalisasi Simpang

YOGYA, TRIBUN - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulyianto mengatakan, normalisasi simpang perlu segera dilaksanakan. Menurutnya simpang-simpang di Kota Yogyakarta memiliki potensi menyumbang kemacetan. Oleh sebab itu perlu dilakukan normalisasi.

Dinas Perhubungan sudah melakukan kajian pada 17 simpang di Kota Yogyakarta. Yulyianto mengatakan simpang dapat menyebabkan kemacetan karena terlalu siku.

"Kami memang sudah lakukan kajian terkait dengan itu. Normalisasi simpang itu memang perlu, karena kalau simpang terlalu siku, maka kendaraan yang akan berbelok harus memperlambat laju kendaraan. Hal itu tentunya akan membuat kendaraan dibelakangnya melambat, sehingga terjadi penumpukan," katanya, Minggu (25/11).

"Oleh sebab itu perlu dilakukan rekayasa fisik berupa perubahan sudut belok. Jadi memang harus ada sedikit pelebaran suapaya manuvernya lebih baik dan tidak terlalu siku," sambungnya.

La menyebutkan salah satu simpang yang menjadi perhatian Dishub Kota Yogyakarta adalah Simpang Gondomanan. Menurutnya simpang tersebut harus segera dilakukan normalisasi, khususnya dari arah selatan ke arah barat. Selain simpang yang cukup siku, ruas jalan tersebut juga sempit.

• ke halaman 19

Perlu Segera Dilakukan

• Sambungan Hal 13

"Kita perhatikan yang Simpang Gondomanan itu, yang dari arah selatan, dari arah (Jalan) Kataonso ke arah barat menuju Jalan Senopati kan belok kiri jalan terus. Tetapi tidak bisa jalan terus karena digunakan untuk mengantre kendaraan yang lurus. Ruas jalan juga tidak terlalu lebar," ujarnya.

Korbankan taman

Namun, untuk menormalisasi simpang tersebut harus ada yang dikorbankan, yaitu taman. Hal itu karena perlu pelebaran simpang untuk mengubah sudut belok. Ia juga mengungkapkan bahwa *VC Ratio* di jalan tersebut juga cukup tinggi, yaitu 0,8, sehingga perlu segera dilakukan normalisasi.

Untuk mendukung lanjutti kajian yang dilakukan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan organisasi

perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Terkait dengan normalisasi, OPD teknis yang melakukan pengerajan.

"Kami sudah sampaikan hasilnya kepada OPD teknis, tetapi juga tidak kemudian harus. Kajian yang kami lakukan itu kan telaah, sifatnya masukan untuk OPD teknis lain. Untuk tindak lanjutnya itu kewenangan OPD terkait dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri," ujarnya. [maw]

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005